

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sedang menjadi sorotan. Itu dikarenakan untuk saat ini sampah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat menumpuk. Penumpukan sampah ini disebabkan karena penutupan sementara TPA Piyungan yang ada di Kabupaten Bantul. Penutupan TPA Piyungan ini dikarenakan telah mengalami over kapasitas sehingga TPA piyungan sudah tidak bisa menampung sampah yang terus bertambah tiap harinya. Sehingga dari penutupan sementara TPA piyungan ini mengakibatkan banyaknya sampah yang menumpuk di Yogyakarta. bahkan dari penutupan TPA Piyungan ini juga sangat berdampak bagi 3 wilayah yang ada di Yogyakarta yang tentunya 3 daerah tersebut memang tergabung di dalam fasilitas pengelolaan sampah TPA Regional Piyungan, 3 wilayah yang terdampak langsung dari penutupan sementara TPA Piyungan ini yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Ahmad Mustaqim, 2023).

Menumpuknya sampah ini bisa dilihat bahkan di berbagai tiap sudut kota, tiap kampung, bahkan di sudut-sudut jalan raya dapat terlihat penumpukan sampah yang dibuang oleh warga masyarakat DIY. tentunya penumpukan sampah yang lama seperti ini akan sangat merusak pemandangan Kota Yogyakarta yang notabennya merupakan kota yang dikenal sebagai kota pariwisata. Selain merusak pemandangan keindahan kota juga tentunya banyaknya sampah yang menumpuk

ini dapat berdampak kepada lingkungan dan kesehatan warga masyarakat. Dan yang merasakan dampaknya juga adalah masyarakat sekitar. Tentunya permasalahan ini harus segera diatasi agar tidak berkepanjangan dan sekaligus menjaga lingkungan sekitar DIY. dan juga yang paling utama untuk menjaga kesehatan bagi seluruh warga masyarakat DIY agar terhindar dari berbagai penyakit (Sulistiyani & Wulandari, 2017).

Kasus sampah yang semakin hari semakin memburuk ini tentunya membuat hampir tiap kabupaten yang ada di DIY mengupayakan berbagai cara agar penumpukan sampah masyarakat DIY dapat segera teratasi. Penumpukan sampah yang ada di tiap daerah ini tentunya di dasari dari penutupan sementara TPA Piyungan yang ada di Kabupaten Bantul sehingga penumpukan sampah terjadi di tiap daerah yang ada di DIY. Maka dari itu untuk mengatasi kasus penutupan sementara TPA Piyungan yang tentunya akan berakibat kepada penumpukan sampah. sehingga Pemerintahan Provinsi Yogyakarta menyarankan kepada tiap pemerintahan kabupaten yang ada di DIY untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap sampah yang ada di tiap kabupatennya dengan membangun atau mendirikan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Tentunya pembangunan TPST ini juga nantinya untuk membantu mengatasi kasus penumpukan sampah yang ada di TPA Piyungan dapat berkurang sehingga TPA Piyungan juga dapat bertahan lama. Perbedaan dari pembangunan TPST dan TPA ini dikarenakan pembangunan TPST ini bertujuan agar sampah yang masuk langsung diolah kembali sehingga sampah yang masuk tersebut tidak ditimbun tetapi diolah kembali untuk dijadikan barang yang dapat dipergunakan dan memiliki manfaat lagi. Salah

satu kabupaten yang sedang mengupayakan agar penumpukkan sampah di DIY ini dapat segera teratasi yaitu di Kabupaten Sleman. Langkah yang diambil oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman untuk menurunkan kasus penumpukan sampah yaitu dengan membuat tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang telah disiapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman. TPST ini terletak di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan. Untuk saat ini pembangunan TPST yang ada di kelurahan tamanmartani ini sudah ditahap selesai dan sudah mulai beroperasi (Haris Firdaus, 2023).

Pembangunan TPST yang terletak di kalurahan Tamanmartani ini merupakan salah satu dari 3 TPST yang akan dibangun oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman. TPST yang akan dibangun di daerah Sleman sendiri nantinya akan berjumlah 3 TPST yang akan dibagi menjadi 3 tempat yaitu di timur, tengah, dan di barat Kabupaten Sleman. Untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah ditahap selesai yaitu TPST yang ada di wilayah Tamanmartani. TPST Tamanmartani sendiri terletak pada timur Kabupaten Sleman. Dan untuk TPST yang terletak di tengah dan barat masih kedalam tahap proses pembangunan. Tentunya dengan adanya keberadaan TPST yang terletak di kalurahan Tamanmartani ini juga tidak jauh dari dukungan warga masyarakat sekitar Kalurahan Tamanmartani yang bersedia memberikan lahannya untuk dijadikan tempat pengelolaan sampah. Karena mengingat pembangunan 3 TPST yang akan direncanakan oleh pemerintahan Kabupaten Sleman ini kendala pada pembebasan lahan oleh masyarakat sekitar. sehingga untuk saat ini baru 1 tempat TPST yang

sudah jadi dan sudah mulai beroperasi yaitu TPST yang ada di Kalurahan Tamanmartani (Rinepta, 2023).

Penelitian terkait dengan upaya Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah guna mengurangi resiko dampak lingkungan ini sangat tertarik untuk dijadikan penelitian. Karena pada dasarnya untuk saat ini kasus darurat sampah yang terjadi di DIY masih sulit untuk diatasi bahkan kasus ini sebenarnya sudah sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tetapi permasalahan ini sampai saat ini masih belum bisa diatasi dengan baik oleh pemprov DIY. Apalagi kasus penumpukkan sampah ini akan terus terjadi karena mengingat TPA Piyungan yang terletak di Kabupaten Bantul ini sudah mengalami over kapasitas yang seharusnya TPA Piyungan ini masa bakti tempatnya selesai pada tahun 2018 tetapi masih terus dipaksa untuk menampung sampah yang tiap harinya terus masuk. menumpuknya sampah ini sangat berbahaya sekali bagi dampak lingkungan karena akan terjadi permasalahan lingkungan yang terjadi dari akibatnya sampah yang terus menumpuk di masyarakat selain itu juga masyarakat akan merasakan dampak dari permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah ini yaitu bakal banyak warga masyarakat yang terkena berbagai penyakit. Maka dari itu Pemprov DIY mengeluarkan kebijakan desentralisasi bagi tiap-tiap Pemerintah Kabupaten dalam menangani kasus sampah yang ada di tiap daerahnya. Agar kasus sampah ini perlahan mulai bisa teratasi dengan baik dan juga membantu agar penumpukan sampah yang ada dilingkungan Yogyakarta dapat teratasi dengan baik. Dan juga membantu agar tidak terjadi penumpukan sampah yang berlebih di TPA

Piyungan agar TPA Piyungan ini dapat beroperasi lebih lama lagi karena mengingat TPA Piyungan yang sudah mengalami overload kapasitas sampah (Mada, 2023).

Selama ini desentralisasi dipahami sebagai pelimpahan wewenang atau tanggung jawab dari pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Kabupaten. Pelimpahan ini tentunya didasari agar dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah tersebut sehingga agar dapat segera teratasi dengan baik. Sehingga Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangannya dapat segera membuat regulasi terkait dengan suatu permasalahan yang sedang dihadapi dengan cepat tanpa harus menunggu regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Tentunya pembuatan regulasi ini juga akan bertujuan agar menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dari kasus penelitian yang diangkat di penelitian ini telah ditemukan adanya regulasi yang telah ditetapkan dan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui PERBUP Kabupaten Sleman No. 22 Tahun 2022 tentang Upaya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman.

Proses kebijakan dalam upaya pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta ini akan bersifat wajib. Dikarenakan agar pihak pemerintah kabupaten yang terdampak dari penutupan TPA Piyungan ini dapat mengelola sampahnya secara mandiri. Sehingga nantinya tidak lagi bergantung ke TPA Piyungan yang saat ini telah resmi ditutup total sejak awal bulan mei 2024. Selain itu juga kebijakan desentralisasi dalam upaya pengelolaan sampah ini sekaligus menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi

Yogyakarta dalam mengatasi dan menurunkan kasus darurat sampah yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat DIY.

Teori yang digunakan untuk menjadikan landasan analisis dan menjelaskan tentang desentralisasi terkait pengelolaan sampah yang terjadi di daerah Sleman pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan teori Politik Desentralisasi. teori Politik Desentralisasi ini akan menggunakan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Jesse C. Ribot karena teori yang dikemukakan oleh jesse C. Ribot ini sangat cocok dan sesuai dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. itu dikarenakan menurut Jesse C. Ribot Politik Desentralisasi merupakan sebuah tindakan yang dimana pemerintah pusat secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah kabupaten. tentunya kekuasaan ini menyangkut politik (biasanya berkaitan dengan kekuasaan pengambilan sebuah keputusan) yang menyangkut kegiatan administratif dan kewilayahan yang ada di daerah. Dalam penelitian ini penulis secara khusus akan melihat Politik Desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dalam upaya pengelolaan sampah guna mengurangi penumpukan sampah yang diakibatkan dari penutupan TPA Piyungan.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan uraian latar belakang diatas tentunya penulis memiliki ketertarikan untuk dapat melihat bagaimana proses desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta kepada Pemerintahan Kabupaten Sleman terhadap upaya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman guna

mengurangi dampak bagi lingkungan. Rumusan masalah ini diturunkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian tanggung jawab yang diberikan oleh pihak Pemerintahan Provinsi Yogyakarta kepada Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam melakukan upaya pengelolaan sampah ?
2. Power atau kemampuan apa yang dimiliki oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam Upaya melakukan pengelolaan sampah yang ada di wilayah Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses desentralisasi atau pemberian tanggung jawab yang akan diberikan pemerintah Provinsi Yogyakarta kepada Pemerintahan Kabupaten Sleman terhadap upaya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman guna mengurangi dampak bagi lingkungan. Serta dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam melakukan pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya dalam setiap penelitian terdapat manfaat yang akan diberikan bagi pembacanya. Maka dari itu adapun manfaat dari penelitian yang telah dilakukan ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses Politik Desentralisasi yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam Upaya melakukan pengelolaan sampah serta dapat memahami pemberian tanggung jawab apa saja yang bisa dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam melakukan pengelolaan sampah selain itu juga penelitian ini akan menambah wawasan dan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah sehingga dapat meminimalisir penumpukan sampah dilingkungan sekitar.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

- 1) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat terhadap kemampuan pengelolaan sampah sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan sampah.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

b. Bagi pemerintah

- 1) Mendeskripsikan upaya proses Politik Desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta kepada Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam melakukan upaya pengelolaan sampah.
- 2) Mendeskripsikan apa saja kewenangan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk menjalankan kebijakan Politik Desentralisasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya pengolahan sampah.

E. Tinjauan Pustaka

Shandi Sahputra dan Nanang Bagus Srihardjono (2018). didalam penelitiannya menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup sudah sangat erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan tentunya hal ini didasari oleh kurang adanya kesadaran yang dilakukan oleh Masyarakat untuk menjaga lingkungan. Maka dari itu untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat tersebut harus adanya Pembangunan partisipatif. Agar mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang tentunya akan berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya (2023). di dalam penelitiannya yang membahas terkait dengan bagaimana peran pemerintahan desa dalam Upaya untuk meningkatkan kebersihan yang ada di desa sehingga tidak berdampak bagi

lingkungan tersebut. Upaya tersebut tentunya memerlukan bantuan dan kesadaran dari Masyarakat sekitar agar dapat mengelola sampah dengan baik. Karena apabila tidak adanya dukungan Masyarakat yang terlibat pastinya untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan akan semakin sulit.

Sukwika dan Noviana (2020). di dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang status keberlanjutan dari pengelolaan sampah terpadu TPST yang ada di Bantargebang antar stokeholder sangat beragam. Serta membahas terkait dengan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, berteknologi, dan terkoordinasi. Tentunya dengan adanya pengelolaan sampah terpadu TPST akan sangat membantu terhadap pengolahan sampah sehingga keberlanjutan TPST ini harus bisa dipertahankan dan tentunya harus ada dukungan dari pemerintahan TPST ini dapat terus berkembang dengan baik.

Kurniawan (2019). di dalam penelitiannya berisikan tentang perubahan pola konsumsi Masyarakat ini tentunya menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan tentunya karakteristik sampah yang juga akan sangat beragam dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu dibentuklah sebuah program untuk dapat mengolah sampah organik dan non-organik secara baik agar dapat menjadi usaha baru yang tentunya akan membantu keuntungan tambahan bagi Masyarakat sekitar.

Selanjutnya Sari dan Mulasari (2017). di dalam penelitiannya menjelaskan tentang pengelolaan sampah merupakan salah satu konsep yang dapat membantu dalam kasus permasalahan akibat dari sampah. Yang tentunya juga membutuhkan peran aktif dari Masyarakat untuk mengupayakan untuk sampah tersebut dapat

dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini juga untuk dapat mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan Pendidikan dengan perilaku pengelolaan sampah yang ada di Kalurahan Bener Yogyakarta.

Asiyah (2019) di dalam penelitiannya membahas terkait dengan pengaturan pengelolaan sampah telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008. Apabila daerah mampu mengelola sampah dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip Good Environmental Governance sudah dapat dikatakan terpenuhi.

Mas'adi, Aria Aji Priyanto, Ahmad Nurhadi (2020). di dalam penelitiannya ini berisikan tentang mengetahui bagaimana strategi pengelolaan sampah yang ada di TPST se-kecamatan Pemulang baik itu dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman strategi di TPST se-kecamatan Pemulang Kota Tangerang Selatan.

Dalilah (2021). di dalam penelitiannya ini membahas terkait dengan bahayanya sampah plastik terhadap lingkungan karena sampah plastik memerlukan waktu yang cukup lama untuk di daur ulang daripada sampah lainnya dan juga sampah plastik sangat susah untuk teruraikan sehingga tentunya sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan dan tentunya akan berdampak juga bagi Kesehatan.

Ali Imron dan Ulfatul Khoeriyah (2023). Dalam penelitiannya ini membahas tentang sistem pengelolaan sampah beberapa desa masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini tentunya dapat ditinjau dari perilaku warga yang terbiasa membuang sampah tanpa dipilah antara sampah organik dan non-organik. Hal ini juga didasari karena masih belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana

yang memadai terkait dengan sampah serta masih minimnya kesadaran dari Masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Tentunya diadakannya penelitian ini guna meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan dapat mengetahui sistem pengolahan sampah yang benar.

Rira Nuradhawati (2019). di dalam penelitiannya membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi adalah kontinum. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya asas sentralisasi saja dalam menjalankan sistem pemerintahannya, sebaliknya juga tidak ada penyelenggara yang menjalankan kebijakan desentralisasi saja sehingga hubungan antara sentralisasi dan desentralisasi ini kaitannya sangat berhubungan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebelumnya yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis saat ini yaitu penelitian yang akan di ambil oleh penulis saat ini pembahasannya akan berfokus kepada bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). dalam upaya melakukan pengolahan sampah. tentunya dalam melakukan upaya pengolahan sampah ini harus melibatkan banyak dukungan baik dukungan yang diberikan oleh pemerintahan Provinsi serta masyarakat juga memiliki peran penting agar keberlangsungan pengolahan sampah ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan. dan tentunya yang menjadi poin penting perbedaan dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan penelitian yang saat ini yaitu adanya juga hubungan Politik Desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY kepada Pemerintahan

Sleman dalam melakukan upaya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman. untuk saling kebersamai dalam menanggulangi kasus sampah yang menumpuk saat ini. Tentunya apabila tidak segera diatasi dengan baik penumpukan sampah yang terjadi akan berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan Masyarakat terutama di Daerah Sleman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga dilihat dalam hal bagaimana power desentralisasi yang akan dimiliki oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan sampah yang akan dilakukan di dalam lingkungan wilayah Sleman ini. dengan melakukan Pembangunan Tempat Penampungan Sampah berbasis Terpadu (TPST) yang nantinya TPST ini juga akan menampung Sebagian sampah dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Sleman untuk dapat diolah lagi dengan baik.

F. Kajian Teori Dasar

1. Pengertian Politik Desentralisasi

Definisi Desentralisasi Politik menurut Albab (2016). Menjelaskan secara umum merupakan salah satu cara dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau suatu kekuasaan dalam menyelenggarakan Sebagian atau bahkan seluruh fungsi di dalam manajemen dan suatu administrasi di dalam pemerintahan dari pemerintah pusat dan Lembaga-lembaganya, pejabat pemerintah, atau bahkan Perusahaan yang tentunya bersifat semi otonom. Didalam penelitian ini berlandaskan Teori Politik Desentralisasi yang dikemukakan oleh Jesse c Ribot

(2002) yang dimana menurut teorinya menjelaskan Politik Desentralisasi yang telah dituliskan di dalam bukunya yang berjudul "Democratic Decentralization of National" bahwasannya Desentralisasi merupakan suatu kegiatan perpindahan kekuasaan (Transfer Of Power) yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada cabang-cabang seperti dalam melakukan penyempurnaan administrator, atau tehnik lokal dari agen-agen yang sejalan dengan departemen tersebut (Ribot 2002).

Menurut Jesse C. Ribot (2002). Desentralisasi dibagi menjadi 3 definisi ketiga definisi dari desentralisasi tersebut tentunya memiliki tugasnya masing-masing di dalam pemerintahan yaitu antara lain :

1. Politik atau yang disebut Desentralisasi Demokratis yang terjadi Ketika Kekuasaan dan sumber daya akan dialihkan kepada suatu otoritas yang akan mewakili dan memiliki tanggung jawab kepada Masyarakat lokal. Desentralisasi. Desentralisasi Demokratis merupakan bentuk dari pendekatan partisipatif yang dilembagakan. Hal ini tentunya akan dianggap sebagai bentuk desentralisasi yang "Kuat" dan akan memiliki manfaat yang besar (Rakyat, n.d.).
2. Dekosentralisasi atau disebut sebagai Desentralisasi Administratif yang akan melibatkan suatu pengalihan kekuasaan ke cabang-cabang lokal di negara bagian pusat seperti administrator atau agen-agen dari kementrian setempat.
3. Privatisasi adalah sebuah pengalihan kekuasaan kepada entitas non-negara, termasuk individu, Perusahaan, LSM, dan lainnya. Meski sering dilakukan atas nama desentralisasi, privatisasi tentunya bukanlah salah

satu bentuk dari desentralisasi. Hal ini karena berjalan sesuai dengan logika eksklusif bukan dari logika publik yang inklusif dalam desentralisasi

Dari ketiga definisi teori desentralisasi yang telah di jelaskan oleh Jesse C. Ribot. Di dalam penelitian ini lebih berfokus kepada konsep teori Politik Desentralisasi karena terdapat perpindahan wewenang atau tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dalam melakukan pengolahan sampah.

Politik Desentralisasi bisa dikatakan berjalan lancar apabila adanya dukungan dari beberapa pihak agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Menurut Jesse C ribot (2002) Politik Desentralisasi melibatkan :

- a. Adanya peranan penting partisipasi Masyarakat dalam desentralisasi.

Peranan Masyarakat dalam desentralisasi yaitu agar bertujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lokal. Setiap keputusan yang harus menyangkut kepentingan publik tentunya harus ikut serta melibatkan unsur Masyarakat di dalamnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi Masyarakat turut akan menentukan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi demokratis atau Politik Desentralisasi

- b. Devolusi kekuasaan

Devolusi kekuasaan ini merupakan adanya perpindahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Lokal. Dalam penyerahannya disertai

dengan bidang legislatif, hukum atau administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah.

2. Pengertian Power dalam Desentralisasi

Jesse C. Ribot (2002). telah menjelaskan definisi secara rinci terkait dengan Desentralisasi politik. Dan dari penjelasan konsep teori Desentralisasi oleh Jesse C. Ribot ini terdapat penjelasan yang berkaitan dengan kekuasaan Transfer Of Power yang dimana di dalam penjelasan kekuasaan Transfer Of Power ini terdapat 3 penjelasan dari kekuasaan Power yang berkaitan dengan konsep teori Politik Desentralisasi antara lain :

A. Authority atau otoritas

Teori Otoritas ini diambil dari teori Jesse C. Ribot (Ribot, 2007). menjelaskan otoritas lokal yang representatif dapat diperkuat melalui pengakuan. namun lembaga-lembaga tersebut mungkin akan melemah jika kekuasaan yang mereka miliki terlalu kecil untuk bisa berfungsi secara efektif, atau jika lembaga-lembaga paralel membayangi atau menghalangi kemampuan mereka untuk melayani kepentingan publik. Penjelasan otoritas ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Max Weber yang menjelaskan sesuatu persoalan yang mengenai apakah yang membuat orang-orang mematuhi perintah dan mau melakukan apa yang akan diperintahkan kepadanya. Max weber telah membedakan antara sebuah kekuasaan (Power) yang berarti kemampuan untuk menggerakkan orang-orang dengan kekuatan dan kewenangan (authotity) yang berarti perintah yang nantinya akan

harus ditaati oleh orang-orang dengan kesediaannya sendiri (Dr. H. M. Mas'ud Said, 2020).

Otoritas sendiri merupakan sesuatu kewenangan yang harus ditaati oleh seluruh Masyarakat sekitar dengan tentunya atas dasar kesediaannya sendiri. Maka dari itu apabila sebuah Lembaga pemerintahan yang telah diberikan otoritas tentunya memiliki kewajiban dalam menjankan sebuah kewenangan yang nantinya kewenangan yang dibuat tersebut harus bisa ditaati dengan baik oleh Masyarakat. dan dari kewenangan yang dibuat tersebut juga harus bisa merubah sikap Masyarakat sekitar. sebagai contoh Lembaga Pemerintahan Desa memberikan atau membuat kewenangan untuk dapat mengatasi sebuah persoalan di wilayahnya maka dari itu kewenangan tersebut tentunya harus bisa merubah sikap Masyarakat sehingga Masyarakat harus bisa mengikuti dan mentaati kewenangan yang telah diterapkan oleh Pemerintahan Desanya dengan baik.

B. Resource

Resource atau sumber daya menurut jesse C. ribot (2002) menjelaskan bahwasannya resource atau sumber daya ini harus memiliki sifat yang relevan serta sumber daya ini bisa berupa bantuan baik dari segi pendanaan, bantuan hukum, dan bantuan teknologi, serta diperkuat menurut Busro (2018). merupakan segala sesuatu yang nantinya merupakan asset dari lembaga-lembaga agar dapat mencapai tujuannya. Sumber daya ini akan meliputi finansial, fisik, manusia atau SDM, dan kemampuan Teknologi. Sumber daya finansial ini tentunya salah satu unsur penting dalam rangka membentuk sebuah lembaga yang nantinya akan terus maju dan dapat

terus berkembang karena akan berhubungan langsung dengan pendanaan. Sehingga dapat mengembangkan serta tentunya dapat melanjutkan kinerja dari sistem yang dibuat oleh Lembaga tersebut. Lalu ada sumber daya fisik yang akan menyangkut terkait penunjang secara fisik berdirinya suatu Lembaga tersebut seperti halnya alat-alat kelengkapannya. Setelah itu ada sumber daya manusia merupakan salah satu sektor sentral dan penting dalam rangka mencapai tujuan di suatu Lembaga. Karena tentunya adanya kemampuan skill dari para pekerja dan kualitas sumber daya manusia nantinya akan dapat menggerakkan Lembaga dengan benar dan tentunya juga baik. Lalu yang terakhir ada sumber daya teknologi yang merupakan unsur penunjang penting dalam menggerakkan Lembaga. Karena dengan adanya teknologi yang lengkap dan kecanggihan teknologi yang dimiliki akan sangat membantu dan memudahkan kinerja dari Lembaga tersebut.

Resource atau sumber daya tentunya akan memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas dari sistem pemerintahan. Karena dengan adanya sumber daya yang baik dan mendukung akan sangat mempermudah kinerja yang akan dijalankan oleh Pemerintahan tersebut. Selain faktor pendukung sumber daya juga akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah sistem yang akan dijalankan oleh suatu Pemerintahan tersebut. Sebagai contohnya agar kewenangan yang dijalankan atau diterapkan oleh Pemerintahan Desa tentunya harus diimbangi juga dengan sumber daya yang baik dari Pemerintahan Pusat agar sistem kewenangan yang diterapkan di salah satu Pemerintahan Desa tersebut dapat berjalan baik dan sesuai dengan rencana (ribot,2002)

C. Legitimasi

Legitimasi menurut jesse c. ribot (Ribot, 2007) menyatakan bahwa adanya dukungan LSM, dan masyarakat sipil. Serta sebuah perusahaan atau lembaga akan memiliki kontrak dengan masyarakat yang dimana untuk melakukan sebuah kegiatannya yang berdasarkan dari nilai-nilai justice, dan bagaimana lembaga tersebut mampu menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk dapat melegitimasi tindakan yang akan dijalankan. Legitimasi juga menyatakan bahwa organisasi harus secara selalu mencoba meyakinkan bahwa mereka melakukan sebuah kegiatan akan sesuai dengan batasan dan norma-norma yang ada di dalam Masyarakat (Badjuri et al., 2021).

Secara tidak langsung legitimasi akan menjadi acuan bagi pemerintahan apakah sistem atau kewenangan yang diterapkan pemerintahan tersebut akan mendapat dukungan dari Masyarakat dalam menanggulangi kasus atau suatu permasalahan yang sedang dihadapi atau tidak. Salah satu contoh Pemerintahan Kanupaten Sleman membuat regulasi terkait dengan sampah apakah Masyarakat sekitar mendukung dengan regulasi tersebut atau tidak.

3. Sampah

Sampah merupakan hasil dari berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan merupakan salah satu dari munculnya permasalahan lingkungan serta berdampak juga pada Kesehatan manusia. Sampah juga disebut sebagai limbah yang tidak lagi dikehendaki keberadaannya karena tak ternilai secara ekonomis maka dari itu harus ada Upaya untuk mengatasinya. Karena mengingat kasus

penumpukan sampah sangat sering terjadi diberbagai wilayah di Indonesia apabila tidak segera diatasi tentunya akan sangat mencemari lingkungan dan sangat berbahaya bagi Kesehatan (Fitriana & Mulyono, 2019).

Sampah terdiri menjadi 3 yaitu antara lain sampah organik, anorganik serta sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk penjelasan terkait dengan ketiga jenis sampah tersebut sebagai berikut :

- a. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme dari makhluk hidup baik itu manusia, hewan, serta juga tumbuhan. Sampah organik tentunya sangat sering dijumpai di kehidupan sehari-hari Adapun contohnya yang termasuk sampah organik adalah sayur dan buah, kotoran hewan hingga daun kering (Qothrunnada, 2022)
- b. Sampah anorganik adalah limbah yang diproduksi dari bahan-bahan yang nonhayati, sumber daya alam yang tidak terbarui dan juga hasil dari proses teknologi dari pengelolaan bahan tambang dan industri. Sebagian dari sampah anorganik ini tidak bisa terurai oleh alam atau mikroorganisme. Adapun contoh sampah anorganik yaitu plastik, sisa dari pecahan kaca, potongan besi, tembaga, botol yang terbuat dari kaca dan plastik (dinda hafid hafifah, 2023).
- c. Lalu sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang berasal dari bahan beracun dan berbahaya yang menurut PP no. 101 tahun 2014 yang mendefinisikan sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau sebuah komponen yang secara tidak langsung

maupun tidak dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan bagi lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun contohnya baterai bekas, oli bekas, lampu bohlam, serta aki bekas (Dadan Sumiarsa, Rani Maharani, n.d.)

G. Definisi Konseptual

1. Politik Desentralisasi

Politik Desentralisasi ini terjadi dikarenakan adanya kegiatan transfer of power yang dilakukan di dalam pemerintahan. Transfer of power yang dimaksud merupakan terjadinya perpindahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Lokal. Perpindahan ini di dasari dengan melakukan penyempurnaan administrator, atau tehnik lokal dari agen-agen yang sejalan dengan departemen tersebut. Desentralisasi menurut jesse C. Ribot juga dibagi menjadi 3 desentralisasi yaitu diantaranya ada Politik atau Desentralisasi Demokratis, Dekosentralisasi atau Desentralisasi Administratif, dan Privatisasi. Selain itu juga Politik Desentralisasi ini bukan hanya membantu Pemerintah Pusat saja tetapi akan sangat bermanfaat juga bagi sistem pemerintahan yang lebih rendah seperti halnya Pemerintahan Kabupaten. Desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten juga akan sangat bermanfaat karena tentunya Pemerintah Pusat akan lebih memberikan perhatian lebih kepada Pemerintahan Kabupaten.

2. Power Desentralisasi

Power Didalam desentralisasi merupakan kekuatan yang akan mempengaruhi sesuatu pelaksanaan kebijakan yang akan dijalankan baik kebijakan

yang berlangsung di Perusahaan atau di dalam Pemerintahan. Power didalam desentralisasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap berlangsungnya desentralisasi serta juga akan menjadi landasan berhasil atau tidaknya pelaksanaan desentralisasi yang sedang berlangsung atau yang sedang diterapkan. Terdapat 3 indikator power desentralisasi yaitu ada Otoritas, Resource, dan terdapat juga Legitimasi. Dari ketiga indikator yang terdapat di dalam power desentralisasi tersebut tentunya yang akan mempengaruhi berhasilnya suatu Politik Desentralisasi yang diterapkan.

3. Sampah

Keberadaan sampah yang semakin hari semakin banyak ini menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Meningkatnya jumlah sampah ini diakibatkan oleh banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehingga banyak juga sampah yang dibuang atau yang dihasilkan dari sisa-sisa aktivitas tersebut. Masalah sampah hampir sering ditemui di berbagai wilayah baik itu di wilayah permukiman, perkotaan, pedesaan, maupun tempat perindustrian. Tentunya jika masalah sampah ini tidak segera bisa diatasi dengan baik dan benar akan dapat menimbulkan masalah yang serius terutama dari segi lingkungan dan Kesehatan manusia.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang diterapkan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan Definisi Operasional Power Desentralisasi. Di dalam Politik Desentralisasi ini terdapat Power yang akan menjadi landasan bagi pelaksanaan

Politik Desentralisasi dan di dalam penelitian ini terdapat Power Desentralisasi yang terdiri dari 3 indikator yaitu :

Variabel	Indikator
1. Otoritas	Peraturan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai upaya pengelolaan sampah.
2. Resource	Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Legitimasi	Dukungan yang diberikan oleh masyarakat sekitar.

1. Otoritas

Otoritas merupakan kemampuan yang akan dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten dalam menanggulangi suatu permasalahan yang sedang terjadi. Kemampuan ini bisa seperti pembuatan atau penerapan regulasi terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi di daerah tersebut (Ribot, 2007).

2. Resource

Resource merupakan sumber daya yang berarti sumber daya apa yang diterima oleh Pemerintahan Daerah terkait dengan Politik Desentralisasi ini.

Sumber daya ini bisa berisikan antara lain bantuan teknologi, Sumber daya manusia (SDM), dan pendanaan (Ribot, 2007).

3. Legitimasi

Legitimasi merupakan dukungan masyarakat sekitar. Politik Desentralisasi akan berjalan dengan lancar dan baik apabila adanya dukungan yang diberikan oleh Masyarakat (Ribot, 2007).

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. tentunya pada penelitian kualitatif ini sebagai metode ilmiah yang sering digunakan oleh peneliti dalam bidang ilmu sosial. Termasuk juga di dalam ilmu Pendidikan, di dalam penelitian ini peneliti telah membuat suatu gambaran secara kompleks, serta meneliti kata-kata, dan mendapatkan laporan terperinci dari pandangan responden yang melakukan studi pada situasi yang alami (Fadli, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018) didalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya data kualitatif yang akan memaparkan serta memberikan gambaran terkait dengan masalah yang diteliti. Serta jenis data yang digunakan dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan ini memperoleh sumber data informan penelitian yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan Pemerintahan Desa Kalurahan

Tamanmartani Sleman dengan mekanisme melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian kualitatif ini peneliti sebagai instrument kunci dalam hal mengumpulkan data, serta menafsirkan data. Untuk alat pengumpulan data di dalam penelitian ini biasanya menggunakan pengamatan secara langsung, wawancara, serta studi dokumentasi.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berasal dari usaha dalam mendeskripsikan suatu permasalahan atau gejala, peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha dalam memotret peristiwa dan kejadian yang akan menjadi pusat perhatian untuk nanti kemudian akan digambarkan sebagaimana adanya. Bisa dikatakan bahwa penelitian ini akan mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, maupun penjelasan dan validasi dari suatu fenomena yang diteliti (Toulasik, 2019).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, dan di Kalurahan Tamanmartani, serta akan dilakukan di lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpatu (TPST) Tamanmartani. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini tentunya telah didasarkan karena peneliti ingin dengan mudah mengetahui dan memahami pengawasan politik desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam mengupayakan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman dengan membangun TPST yang terletak di tamanmartani Selain itu juga TPST ini juga yang akan menjadi penampungan sampah sementara yang ada di wilayah sleman.

3. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari responden yang berisi tentang pernyataan beserta keterangan yang berasal dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Pengawasan Politik Desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam Upaya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang akan terjadi. Data yang didapatkan berasal dari Pemerintahan Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup secara langsung melalui responden berupa data yang telah diperoleh dari hasil temuan dan jawaban yang berasal dari hasil wawancara dengan responden yang terakut. Dasar dilakukannya pengambilan data dikarenakan dengan dasar keprihatinan peneliti terhadap kasus penumpukan sampah yang terjadi di wilayah Yogyakarta terkhususnya Kabupaten Sleman. Penulis memfokuskan penelitian ini melalui pencarian data melalui metode wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang akan menjadi pendukung untuk melengkapi data primer yang berasal dari berbagai jurnal, buku, website, majalah atau koran yang tentunya memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan sehingga penelitian yang dilakukan ini memiliki data yang lebih kuat dan terperinci. data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal Politik

Desentralisasi, jurnal Pengelolaan sampah, Jurnal pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah, jurnal lingkungan hidup, jurnal desentralisasi desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang akan dibutuhkan untuk menjawab pernyataan yang ada di rumusan masalah penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data mengenai variabel yang akan dikaji dalam penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian. Pengamatan ini dilakukan terhadap suatu objek atau pokok dari sebuah permasalahan yang terjadi. Observasi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh peneliti agar dapat mengetahui secara langsung lokasi yang akan menjadi target penelitian. Untuk Observasi yang akan dilakukan di dalam penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan juga dilakukan observasi juga ke lokasi TPST yang juga berlokasi di daerah Kalurahan Tamanmartani Sleman (Pujiyanto, 2021).

2. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Selain itu juga menurut Yuhana dan Aminy (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu bentuk dari komunikasi secara lisan yang dilakukan secara

terstruktur oleh dua orang atau lebih. Baik itu secara langsung ataupun secara jarak jauh. Dalam pengumpulan data penelitian ini peneliti dan responden berhadapan langsung (Face to face) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diambil serta agar bertujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan yang diambil dari penelitian ini.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Narasumber
1.	Bapak Suwadi Staff Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman.
2.	Bapak Sucahyo Staff UPTD Persampahan.
3.	Bapak Tomi Nugraha Carik Kalurahan Tamanmartani.
4.	Bapak Abubakar Pekerja TPST Tamanmartani bagian operator mesin.
5.	Bapak Hariyanto Pekerja TPST Tamanmartani.
6.	Warga masyarakat sekitar TPST Tamanmartani.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan Teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitiannya dengan bukti yang ada sesuai dengan kejadian dilapangan atau di objek penelitian. Metode dokumentasi juga mencari data

mengenai hal-hal yang berasal dari catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi. Dan sebagainya (Kusmiati, 2019).

Hasil dari penelitian ini akan menjadi lebih kredibel dengan adanya data-data yang berasal dari dokumentasi. Data-data di dalam metode dokumentasi dapat berwujud gambar, arsip, biografi. Dan lain-lain. Pengumpulan data-data dalam dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data mengenai narasumber yang akan menjadi tujuan penelitian untuk diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data menurut Aditya (2020). di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasannya teknik analisis data merupakan suatu proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan juga kemampuan pengetahuan yang tinggi. Penelitian kualitatif juga dilakukan sejak sebelum masuk kedalam lapangan atau objek yang menjadi penelitian, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Teknik analisis data tidak bisa disamakan dengan satu penelitian dengan penelitian lainnya. Terutama dengan metode yang akan dipergunakan.

1. Reduksi Data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, serta pada pengabstrakan dan transformasi data kasar atau data mentah yang masih belum diolah menjadi data yang baik untuk penelitian yang

muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data ini berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Di tahap reduksi data ini juga akan berlangsung kegiatan meringkas, pengkodean dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, serta mengarahkan dan membuang yang tidak perlu pada data penelitian. Sehingga dapat mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga mendapatkan kesimpulan finalnya yang dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Date Display*).

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif yaitu penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Sebuah penelitian kualitatif tentunya penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini akan sangat membantu peneliti dalam mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*Verification*).

Pada Langkah kesimpulan ini mengemukakan hasil akhir dari temuan yang telah ditemukan dengan menarik suatu kesimpulan dari pembahasan yang sudah pernah ada dengan tentunya melakukan pemilahan data yang dapat menjawab dari suatu permasalahan yang terjadi agar mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu

permasalahan yang valid. Serta Ketika data sudah mencapai pada titik jenuh peneliti akan langsung menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah disajikan di dalam penelitian ini.